

Ringkasan Eksekutif

Memperkuat Perekonomian Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Pemulihan Ekonomi Global

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik selama tahun 2010 terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB yang meningkat tinggi, neraca pembayaran yang mengalami surplus cukup besar, serta kinerja sektor keuangan yang semakin membaik. Didukung oleh faktor fundamental yang membaik tersebut serta terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan dengan volatilitas yang cukup rendah. Di sisi harga, inflasi sampai dengan pertengahan tahun 2010 masih cukup terjaga. Namun, mulai paruh kedua tahun laporan intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan pangan, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap inflasi, sehingga inflasi tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Di tengah kinerja perekonomian yang semakin membaik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang terdiri dari derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai kendala di sektor riil. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan Bank Indonesia menghadapi trilema yaitu, menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, mengandalkan satu instrumen kebijakan saja tidak cukup sehingga diperlukan suatu bauran kebijakan. Selama tahun 2010 Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari bauran kebijakan untuk stabilitas internal maupun bauran kebijakan untuk stabilitas eksternal. Bauran instrumen untuk stabilitas internal ditujukan untuk stabilisasi harga dan pengelolaan

permintaan domestik, sedangkan bauran instrumen untuk stabilitas eksternal ditujukan untuk pengelolaan aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar. Dari sisi kebijakan suku bunga, selama tahun 2010 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5%. Sementara itu, untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan selain melalui kebijakan suku bunga, mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan merespons derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta berbagai kebijakan Pemerintah.

Ke depan, kinerja perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik. Untuk tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat, surplus neraca pembayaran masih besar, peran intermediasi perbankan membaik, dan inflasi dapat diarahkan pada kisaran sasarannya. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diprakirakan juga terus meningkat dengan inflasi yang semakin rendah. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia tetap akan mengarahkan kebijakannya pada pencapaian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, sedangkan kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bank guna menopang kinerja bank, memantapkan daya saing, dan sekaligus membendung kejutan krisis. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan ditujukan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih efisien, handal, mudah, dan aman.

Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2010

Di tengah kondisi perekonomian global yang semakin kondusif, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2010 semakin baik. Pertumbuhan ekonomi domestik selama tahun laporan mencapai 6,1%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2009 yang hanya mencapai 4,6%. Peningkatan tersebut didukung oleh sumber pertumbuhan yang semakin berimbang, sebagaimana tercermin pada peran investasi dan ekspor yang meningkat. Peningkatan investasi pada tahun 2010 ditandai dengan semakin tingginya peranan investasi yang sifatnya menambah kapasitas ekonomi. Sementara itu, perbaikan kinerja ekspor juga diikuti oleh semakin terdiversifikasinya komoditas dan negara tujuan ekspor, yang tercermin pada membaiknya kinerja sektor-sektor yang menghasilkan komoditas yang diperdagangkan secara internasional (tradable sector), khususnya industri pengolahan. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Indonesia diuraikan secara detail dalam Bab 1, sementara peranan ekspor dan investasi dibahas lebih detail dalam Bab 5.

Kinerja perekonomian domestik selama tahun 2010 tentu saja tidak terlepas dari dinamika perekonomian global. Ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global telah menimbulkan berbagai implikasi pada perekonomian negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Kinerja ekonomi negara-negara maju yang belum solid telah mendorong mereka untuk tetap menempuh kebijakan moneter yang longgar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets yang cukup solid disertai dengan peningkatan tekanan inflasi telah mendorong banyak negara emerging markets mulai melakukan peningkatan suku bunga kebijakan dan pengetatan moneter. Kondisi perekonomian yang cukup

solid tersebut juga mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara-negara emerging markets, dan turut mengakibatkan naiknya harga komoditas global. Dinamika perekonomian global secara detail diuraikan dalam Bab 2.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2010 mengalami surplus cukup besar, mencapai 30,3 miliar dolar AS. Kinerja tersebut didukung oleh transaksi berjalan yang masih mencatat surplus serta tingginya surplus transaksi modal dan finansial. Surplus transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh kinerja ekspor yang tumbuh tinggi, meskipun di sisi lain impor dan pembayaran transfer pendapatan tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, tingginya surplus transaksi modal dan finansial disertai dengan struktur aliran modal yang semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari peranan aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung (FDI) yang meningkat. Peningkatan aliran masuk modal asing didorong baik oleh faktor eksternal, seperti masih melimpahnya likuiditas global, maupun faktor domestik, seperti prospek ekonomi yang terus membaik. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa di penghujung tahun 2010 mencapai 96,2 miliar dolar AS, cukup memadai untuk mendukung kebutuhan impor dan kewajiban eksternal, serta memberikan keyakinan dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Perkembangan NPI yang membaik pada tahun 2010 mendukung penguatan nilai tukar rupiah yang disertai volatilitas yang cukup rendah. Pada tahun laporan, secara rata-rata rupiah mencapai Rp 9.081 per dolar AS, atau terapresiasi sebesar 3,8% dibandingkan dengan akhir tahun 2009, yang disertai tingkat volatilitas yang menurun.

Selain faktor fundamental, kinerja nilai tukar rupiah juga didukung oleh terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya peringkat surat utang Pemerintah dan indeks risiko yang membaik. Dibandingkan dengan nilai tukar negara-negara kawasan, penguatan nilai tukar rupiah pada tahun laporan cukup moderat sehingga tidak mengganggu kinerja ekspor secara signifikan. Perkembangan nilai tukar tersebut tentu saja juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mengelola arus masuk modal asing dalam rangka memperkuat daya tahan perekonomian untuk menghadapi risiko pembalikan arus modal jangka pendek.

Di sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 tercatat 6,96%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5%±1%. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 stabilitas harga masih cukup terjaga, tercermin dari inflasi yang relatif rendah, yaitu sebesar 5,05% (yoy). Namun, memasuki triwulan III 2010, intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan, meningkat tajam akibat anomali cuaca baik di tingkat global maupun domestik. Dengan kondisi tersebut, harga komoditas pangan di pasar global melonjak tajam, dan dalam waktu yang bersamaan harga-harga komoditas pangan di pasar domestik juga meningkat tinggi. Komoditas bahan pokok seperti beras dan aneka bumbu memberi kontribusi kenaikan harga yang sangat besar sehingga inflasi volatile food mencapai 17,74%, jauh lebih tinggi dari inflasi volatile food tahun 2009 yang hanya mencapai 3,95%. Meski demikian, di tengah lonjakan inflasi volatile food, inflasi inti tetap terjaga pada level yang cukup rendah, yaitu 4,28%. Hal ini didukung oleh nilai tukar rupiah yang menguat, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta kapasitas perekonomian yang selama tahun 2010 masih dapat memenuhi peningkatan permintaan. Untuk kelompok administered prices inflasi juga menunjukan tingkat yang moderat, yaitu sebesar 5,40%.

Sementara itu, kinerja sektor keuangan semakin baik dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Industri perbankan semakin solid, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupuan modal (Capital Adequacy Ratio) dan tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang rendah. Selain itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 22,8%. Di pasar saham, meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga diikuti oleh membaiknya fundamental emiten dan struktur pasar yang semakin kondusif. Perkembangan tersebut mendorong IHSG selama tahun

2010 mencatat kenaikan tertinggi di kawasan. Di pasar obligasi, perbaikan tercermin dari penurunan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) sejak awal tahun, yang antara lain disebabkan oleh kesinambungan fiskal yang relatif terjaga. Kinerja pasar saham dan pasar obligasi tersebut juga didukung oleh menurunnya risiko investasi dan relatif menariknya imbal hasil sehingga menarik masuknya arus modal asing ke instrumen tersebut. Di pasar uang, likuiditas cukup besar dan suku bunga pasar uang cenderung mengarah ke batas bawah koridor. Hal tersebut mengindikasikan melimpahnya likuiditas di sektor perbankan dan preferensi perbankan yang masih cenderung menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen jangka pendek.

Beberapa Tantangan Utama Kebijakan

Pencapaian kinerja perekonomian Indonesia yang positif selama tahun 2010 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang perlu direspons secara tepat untuk mendukung agar perekonomian domestik dapat tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Berbagai tantangan utama tersebut diuraikan secara detail di Bab 3. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perekonomian selama tahun laporan adalah derasnya aliran masuk modal asing. Pada prinsipnya, aliran masuk modal asing masih diperlukan sebagai salah satu sumber pembiayaan perekonomian. Namun, aliran masuk modal asing yang cenderung bersifat jangka pendek berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas makro dan menimbulkan kompleksitas kebijakan moneter. Aliran masuk modal asing yang deras dapat mendorong nilai tukar terapresiasi secara tajam dan berpotensi lebih kuat dari daya dukung faktor fundamentalnya. Dalam kondisi tersebut, apresiasi nilai tukar, di samping rentan terhadap risiko koreksi, juga dapat mengurangi daya saing ekspor. Di samping itu, aliran masuk modal asing jangka pendek juga rentan terhadap sentimen negatif yang memicu pembalikan modal secara besar dan tiba-tiba (large and sudden reversal).

Selama tahun laporan, perekonomian juga dihadapkan pada tantangan meningkatnya tekanan inflasi. Untuk mengendalikan inflasi di tengah derasnya aliran masuk modal asing dan ekses likuiditas, langkah kebijakan yang ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi ke depan perlu dilengkapi dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengelola aliran masuk modal asing dan ekses likuiditas. Di samping itu, kebijakan struktural serta koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan sisi pasokan dalam merespons

akselerasi permintaan sehingga perekonomian yang sedang tumbuh tidak cepat memanas (overheating).

Tantangan lain yang dihadapi perekonomian adalah masih besarnya ekses likuiditas di sektor perbankan. Ekses likuiditas perbankan yang besar tersebut dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas makro sehingga perlu dikelola secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, bank sentral perlu menerapkan berbagai instrumen yang dapat mengendalikan likuiditas, baik secara permanen maupun temporer. Lebih lanjut, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mengelola ekses likuiditas yang bersumber dari operasi keuangan Pemerintah. Hal ini mengingat peningkatan sumber pembiayaan APBN yang berasal dari penerimaan valuta asing akan menambah likuiditas dalam perekonomian. Koordinasi tersebut juga diperlukan dalam rangka menambah instrumen yang dapat digunakan dalam memanfaatkan ekses likuiditas untuk pembiayaan kegiatan investasi di sektor riil.

Di sektor perbankan, tantangan yang mengemuka adalah peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah di tengah kondisi ekses likuiditas. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, peran perbankan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia masih relatif terbatas. Kondisi tersebut selain disebabkan oleh masih relatif tingginya tingkat bunga pinjaman, juga disebabkan oleh masih terbatasnya akses masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, terhadap jasa sektor perbankan. Sementara itu, daya saing perbankan domestik dari segi efisiensi, permodalan, dan aset masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan negara-negara lain di kawasan. Ke depan, tantangan yang perlu segera dicari jalan keluarnya adalah bagaimana daya saing perbankan domestik dapat disejajarkan dengan perbankan negara-negara lain di kawasan, khususnya menjelang terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, mengingat semakin pentingnya peran pasar keuangan dalam pembiayaan ekonomi, diperlukan upaya memperkuat sistem keuangan domestik sehingga lebih memiliki daya tahan terhadap berbagai guncangan.

Di sektor riil, tantangan yang dihadapi terutama bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kapasitas perekonomian. Di samping disebabkan oleh akumulasi kapital dan produktivitas yang terbatas, kecepatan peningkatan kapasitas perekonomian yang belum optimal juga disebabkan masih adanya simpulsimpul kendala utama dalam perekonomian. Lima simpul kendala utama tersebut yaitu masih relatif rendahnya penelitian dan pengembangan (R&D), kualitas pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi, serta ketersediaan infrastruktur dan energi.

Respons Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah

Berbagai tantangan di atas menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan, baik kebijakan Bank Indonesia maupun kebijakan Pemerintah. Mempertimbangkan berbagai kompleksitas yang dihadapi, dalam keadaan terdapat aliran masuk modal asing yang deras, Bank Indonesia mengupayakan solusi optimal terhadap trilema yang dihadapi yaitu stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Karakteristik yang dimiliki oleh negara-negara emerging markets membuat peranan stabilitas nilai tukar, di samping stabilitas harga, sangat penting dalam mencapai kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Demikian juga dengan stabilitas sistem keuangan, pengalaman krisis global 2008 memberikan pelajaran bahwa kestabilan moneter tidak menjamin terciptanya kestabilan sistem keuangan. Kestabilan moneter yang tidak disertai dengan kestabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian secara keseluruhan. Uraian secara detail mengenai kompleksitas kebijakan disampaikan di Bab 3.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, mengandalkan pada satu instrumen tentu saja tidak cukup dan diperlukan bauran kebijakan dengan menggunakan berbagai instrumen, baik untuk stabilitas internal maupun untuk stabilitas eksternal. Bauran instrumen untuk stabilitas internal merupakan bauran instrumen untuk stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan domestik, sementara bauran instrumen untuk stabilitas eksternal merupakan bauran instrumen untuk mengelola aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar. Bauran kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan perbankan serta berbagai kebijakan Pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan sektoral. Supaya perekonomian dapat terakselerasi lebih tinggi dan stabilitas makro tetap terjaga maka diperlukan dukungan kebijakan struktural untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas dan daya saing perekonomian. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah selama tahun 2010 diuraikan di Bab 1, sedangkan khusus untuk bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia diuraikan secara lebih detail di Bab 4.

Dalam merespons dinamika dan tantangan perekonomian yang dihadapi, selama tahun 2010 Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai langkah kebijakan untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di bidang moneter, kebijakan Bank Indonesia secara konsisten diarahkan pada upaya pencapaian sasaran inflasi. Dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi, kebijakan suku bunga BI Rate diarahkan konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan tetap kondusif bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Dengan arah kebijakan tersebut, selama tahun 2010 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5%. Untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan, selain melalui kebijakan suku bunga, mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan merespons derasnya arus masuk modal asing. Penerapan strategi bauran kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan perkembangan ekses likuiditas di perbankan yang cenderung persisten, aliran masuk modal asing yang deras, dan tekanan inflasi yang meningkat.

Di bidang perbankan, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan nasional dan mendorong peran intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perbankan yang diterapkan Bank Indonesia pada tahun 2010 berbasis insentif dan disinsentif. Peningkatan ketahanan sistem perbankan ditempuh melalui penguatan struktur permodalan, peningkatan kompetensi pengelola bank, pemantapan sistem pengawasan bank, serta pendalaman pasar keuangan. Selain itu, beberapa penyempurnaan aturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain terkait dengan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum, penyempurnaan sistem pelaporan, rencana bisnis bank, dan posisi devisa neto.

Sementara itu, penajaman kebijakan di bidang sistem pembayaran ditempuh untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran serta untuk mendukung penyempurnaan kebijakan di bidang moneter dan perbankan. Beberapa aturan di bidang sistem pembayaran yang diberlakukan pada tahun 2010 antara lain terkait dengan penyempurnaan penyelenggaraan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional (SKN). Untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dan pengembangan pasar keuangan di Indonesia, penyempurnaan terhadap aturan terkait Fasilitas

Likuiditas Intrahari (FLI) juga ditempuh. Selain itu, untuk memperlancar transaksi ekonomi masyarakat, Bank Indonesia melakukan penerbitan dan pencabutan uang pecahan tertentu.

Dari sisi Pemerintah, kebijakan fiskal pada tahun 2010 tetap diarahkan untuk mempertahankan konsolidasi dan kesinambungan fiskal, serta memberikan stimulus kepada perekonomian. Berbagai stimulus diarahkan baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran. Di sisi penerimaan, pemberian insentif perpajakan dan bea masuk diharapkan mampu mendorong pemulihan dunia usaha. Di sisi pengeluaran, Pemerintah melanjutkan program kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan anggaran pertahanan negara, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja negara, serta mempertahankan pendapatan riil aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke-13. Sementara itu, dalam upaya mempertahankan kesinambungan fiskal, Pemerintah menerapkan kenaikan beberapa tarif dan pengurangan subsidi. Beberapa jenis tarif atau harga yang dinaikkan sepanjang tahun 2010 antara lain tarif cukai tembakau, minuman mengandung ethyl alkohol, dan penerapan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk. Di sisi pembiayaan, upaya yang ditempuh Pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal antara lain melalui penerapan strategi front loading pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan pengelolaan portofolio melalui strategi buyback dan debt switching.

Dalam upaya memperkuat daya dukung perekonomian nasional, Pemerintah juga menempuh beberapa kebijakan sektoral. Kebijakan terutama ditekankan pada pembenahan struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian melalui penyediaan infrastruktur strategis, khususnya yang terkait dengan konektivitas domestik, ketahanan energi, dan peningkatan iklim investasi. Selain itu, Pemerintah juga menyempurnakan berbagai aturan dan strategi untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Di bidang energi, Pemerintah telah memiliki rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional tahun 2010-2025 dan melakukan berbagai langkah strategis untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, terutama yang menggunakan energi terbarukan, gas, dan batu bara.

Dengan semakin kompleksnya risiko dan tantangan perekonomian nasional, tentu saja penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah

menjadi semakin penting. Selama tahun 2010 koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah terutama dilakukan untuk pengendalian inflasi, khususnya untuk mengendalikan inflasi dari sisi volatile food dan administered prices. Selain itu, koordinasi kebijakan juga terus ditingkatkan dalam pengelolaan aliran masuk modal asing dengan mendorong ke arah yang lebih berjangka panjang, khususnya FDI, serta mendorong Initial Public Offering (IPO) saham dan penerbitan obligasi korporasi di pasar modal. Sementara itu, untuk memperkuat respons sisi penawaran, koordinasi dalam mendorong investasi pada infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi juga terus ditingkatkan.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik dan disertai dengan sumber pertumbuhan yang semakin berimbang. Di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2010, surplus NPI masih besar, dan peran intermediasi perbankan juga membaik. Pertumbuhan domestik didukung oleh investasi dan konsumsi yang membaik, serta kinerja ekspor yang masih solid seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara-negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia. Optimisme meningkatnya investasi didukung oleh kemajuan yang dicapai dalam mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur. Peningkatan investasi juga akan didorong oleh membaiknya peringkat surat utang Pemerintah menuju investment grade. Selain itu, peran Pemerintah dalam pertumbuhan diprakirakan akan meningkat dan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011. Secara sektoral, penggerak pertumbuhan di tahun 2011 diprakirakan masih berasal dari sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dalam hal ini peranan sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Dengan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diprakirakan akan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0%-6,5%. Uraian lebih detail tentang hasil proyeksi dan berbagai asumsi yang digunakan disampaikan dalam Bab 6.

Prospek ekonomi domestik yang membaik tersebut didukung oleh kinerja ekonomi dunia pada tahun 2011 yang diprakirakan masih kuat. Ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia diprakirakan akan kembali berada di sekitar rata-rata pertumbuhannya sebelum krisis 2008. Pemulihan ekonomi di negara-negara emerging markets diprakirakan lebih cepat dibandingkan dengan pemulihan di negara-negara maju. Perekonomian di negara-negara maju akan terus membaik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya angka pengangguran dan defisit fiskal. Seiring dengan masih kuatnya kinerja ekonomi dunia, terutama di negara-negara emerging markets, harga komoditas dunia diprakirakan masih akan mengalami kenaikan. Dengan kondisi tersebut, inflasi di negara-negara emerging markets masih akan relatif tinggi, sementara inflasi di negara-negara maju mulai meningkat. Dengan demikian, kebijakan di negara-negara emerging markets diperkirakan cenderung ketat, sementara beberapa negara maju juga mulai melakukan pengetatan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang diprakirakan akan membaik dan kinerja perekonomian dunia yang tetap kuat, NPI masih akan mencatat surplus yang cukup tinggi. Ekspor diprakirakan masih akan tumbuh tinggi di tengah tingginya pertumbuhan impor sehingga secara keseluruhan transaksi berjalan masih mencatat surplus. Di sisi transaksi modal dan finansial, arus masuk modal asing diprakirakan masih berlanjut pada tahun 2011 dengan peranan FDI yang semakin meningkat. Dengan dukungan neraca pembayaran yang solid tersebut, ratarata nilai tukar rupiah pada tahun 2011 diprakirakan tetap stabil.

Di sisi harga, Bank Indonesia dengan dukungan Pemerintah akan mengarahkan inflasi berada dalam kisaran sasarannya, yaitu 5%±1% untuk tahun 2011 dan 4,5%±1% untuk tahun 2012. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang dapat menjangkar ekspektasi inflasi dan memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah, serta koordinasi dengan Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan sisi pasokan. Koordinasi tersebut juga mencakup upaya untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan pokok. Pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah, yang antara lain ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan keterhubungan antarwilayah, diperkirakan dapat membantu peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Pemerintah akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Optimisme untuk membawa inflasi ke dalam kisaran sasarannya juga didasarkan pada adanya rencana Pemerintah di tahun 2011 untuk tidak melakukan kebijakan menaikkan harga barang dan jasa yang bersifat strategis, seperti TDL, Liquified Petroleum Gas (LPG),

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maupun tarif angkutan.

Stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap akan terjaga di tengah fungsi intermediasi perbankan yang meningkat. Peningkatan kinerja makroekonomi akan terus diusahakan untuk tetap sejalan dengan upaya menjaga kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di sisi perbankan, pertumbuhan kredit diprakirakan masih tinggi dengan kredit modal kerja sebagai penggerak utama, sementara kredit konsumsi juga diprakirakan masih akan tumbuh tinggi sejalan dengan perkiraan masih kuatnya konsumsi rumah tangga. Sementara itu, sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi, akselerasi pertumbuhan kredit investasi pada tahun 2011 diprakirakan terus berlanjut. Di pasar keuangan nonperbankan, IPO dan penerbitan obligasi diperkirakan akan lebih marak sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masih tingginya arus masuk modal asing serta perbaikan peringkat surat utang Pemerintah.

Meskipun optimisme terhadap membaiknya kinerja perekonomian ke depan cukup besar, beberapa faktor risiko terhadap prospek inflasi maupun kinerja makroekonomi lainnya tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, potensi terjadinya gangguan produksi dan distribusi bahan makanan dikhawatirkan dapat memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi ke depan. Selain itu, lebih tingginya tekanan inflasi juga dapat bersumber dari peningkatan permintaan yang terlalu cepat dan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga barang atau jasa yang bersifat strategis, seperti TDL, LPG, BBM bersubsidi, maupun tarif angkutan. Dari sisi eksternal, faktor risiko antara lain dapat berasal dari pergerakan harga minyak dunia dan komoditas yang meningkat terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi tekanan inflasi dan kinerja perekonomian Indonesia. Sementara itu, masih tingginya faktor ketidakpastian pemulihan krisis di negara-negara maju dikhawatirkan juga dapat memengaruhi permintaan terhadap komoditas ekspor.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan masih tetap tinggi dan berada dalam tren jangka panjangnya. Seiring dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan volume perdagangan dunia juga masih akan cukup tinggi. Kondisi tersebut akan diikuti oleh peningkatan tren harga komoditas meski pada tingkat yang semakin moderat. Dari sisi domestik, defisit fiskal diperkirakan menurun secara bertahap

sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai kesinambungan fiskal. Dalam jangka menengah, kebijakan Pemerintah akan diarahkan untuk meningkatkan akumulasi kapital dan produktivitas untuk meningkatkan daya saing. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi jangka menengah diprakirakan dapat mencapai di atas 7% dengan tingkat inflasi yang semakin rendah, vaitu sekitar 3,5%. Prospek ekonomi jangka menengah tersebut diprakirakan dapat tercapai apabila aspek utama yang masih menjadi hambatan utama dalam perekonomian Indonesia dapat diselesaikan. Aspek-aspek tersebut meliputi kurangnya ketersediaan energi dan infrastruktur transportasi/distribusi, rendahnya aktivitas penelitian dan pengembangan, rendahnya kualitas dan tingkat inklusivitas sistem pendidikan, dan kesenjangan teknologi.

Arah Kebijakan Bank Indonesia ke Depan

Ke depan, kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di bidang moneter, kebijakan diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Di bidang perbankan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bank guna menopang kinerja bank, memantapkan daya saing, dan sekaligus membendung kejutan krisis. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan ditujukan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih efisien, handal, mudah, dan aman. Arah berbagai kebijakan tersebut diuraikan secara detail dalam Bab 6.

Di bidang moneter, kompleksitas tantangan yang dihadapi memerlukan instrumen yang semakin beragam yang dalam penggunaannya perlu dilakukan secara seimbang dan terukur sesuai perkembangan ekonomi ke depan. Kebijakan suku bunga (BI Rate) akan diarahkan agar tetap konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Bank Indonesia akan melakukan penyesuaian suku bunga kebijakan apabila kondisi perekonomian diperkirakan mengarah pada peningkatan permintaan yang terlalu cepat dan memburuknya ekspektasi inflasi masyarakat sehingga membahayakan pencapaian sasaran inflasi. Terkait nilai tukar, kebijakan akan diarahkan untuk membantu pencapaian sasaran inflasi dengan tetap konsisten pada pencapaian sasaran makro lain serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sementara itu, Bank Indonesia akan terus menjaga cadangan devisa yang mampu mendukung kebutuhan perekonomian sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar. Untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kejutan yang dapat mengganggu stabilitas makro, Bank Indonesia akan memperkuat sistem deteksi dini agar potensi terjadinya kejutan dapat diidentifikasi lebih awal dan dipersiapkan langkah-langkah mitigasinya. Selain itu, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mengelola ekses likuiditas dan arus modal asing.

Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menopang kinerja bank, memantapkan daya saing, dan sekaligus membendung kejutan krisis. Bank Indonesia akan memperkuat kebijakan untuk mendorong efisiensi perbankan dan fungsi intermediasi, serta memperkuat sistem pengawasan industri perbankan melalui konsolidasi, baik dari sisi permodalan maupun kelembagaan, dengan memberikan insentif dan disinsentif. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menyempurnakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), antara lain dengan mendudukkan bank pada posisi yang tepat sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing, dan menyempurnakan *roadmap* yang dapat menuntun perbankan dari kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan. Selain langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah akan merumuskan strategi nasional untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan yang masih relatif rendah (financial inclusion). Strategi nasional financial inclusion tersebut diarahkan sebagai kerangka acuan yang memuat langkahlangkah strategis dalam upaya memperluas akses masyarakat ke sektor keuangan.

Terkait sistem pembayaran, kebijakan ditujukan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih efisien, handal, mudah, dan aman. Upaya tersebut dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem, serta penguatan aturan hukum. Mulai tahun 2011, Bank Indonesia akan menyempurnakan sejumlah sistem yang ada, diantaranya BI-RTGS, BI-SSSS G-II, Direct Debit-Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Interkoneksi Pembayaran Retail, dan Standarisasi Chip ATM/Debet. Efisiensi di bidang sistem pembayaran juga akan semakin diperkuat dengan diintegrasikannya jaringan sistem pembayaran yang ada melalui National Payment Gateway (NPG). Selain itu, kebijakan ini juga mendukung *financial inclusion* melalui sistem pembayaran oleh agen retail.

Di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi, Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan memanfaatkan berbagai forum yang ada antara lain Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selama ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pangan. Di samping itu, koordinasi juga digunakan sebagai forum untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang menghambat kinerja ekonomi, antara lain terkait respons dalam menghadapi aliran modal asing, dan memperkuat respons sisi penawaran dengan mempercepat implementasi program infrastruktur.



